

## PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 17 JAKARTA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI DAN DIGITALISASI

Tundjung Herning Sitabuana<sup>1</sup>, Dixon Sanjaya<sup>2</sup>, Ibra Fulenzi Amri<sup>3</sup> & Filshella Goldwen<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia  
Email: [dixonsanjaya@gmail.com](mailto:dixonsanjaya@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [ibra.205220249@stu.untar.ac.id](mailto:ibra.205220249@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [Filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:Filshella.205210225@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*The globalization and digitalization due to technological advances has led society to a chaotic situation. Distinction between truth and lies or honesty and dishonesty has become biased. This is era of false truth and post truth. This situation endangers the unity of Indonesian nation. This vulnerability has the potential to occur in younger generation who are largest in number but the intensity of interaction with local cultural values is minimal. The younger generation has experienced a shift in value and ethical behavior that has been degraded. This Community Service's Team (PKM Team) intends to provide legal education to students regarding "Indonesian National Insight". PKM was carried out at SMA Negeri 17 Jakarta in form of socialization regarding importance of Pancasila to national problems. The aim of PKM is to provide understanding and guidance to the younger generation so that they aren't deceived and are able to position themselves in global dynamics. Geopolitic of Indonesia has three basic capitals in geographical, demographic and historical aspects which are full of values to achieve national goals and face the challenges of times. However, technological advances have distorted people's mindset and behavior regarding national insight so the approach to strengthening national insight requires the involvement of all components and the approach taken is more relevant to the young generation. Through this PKM, students gain understanding and national values that need to be instilled to face globalization and digitalization. Strengthening national insight must be carried out continuously by combining socialization and education in community activities.*

**Keywords:** Globalization and Digitalization, National Insight, Students

### ABSTRAK

Arus globalisasi dan proses digitalisasi karena kemajuan teknologi telah mengarahkan masyarakat pada situasi *chaotic* terlepas dari kemanfaatan dan keburukan yang ditimbulkan. Pembedaan antara kebenaran dan kebohongan, maupun kejujuran dan ketidakjujuran menjadi bias. Inilah yang disebut era *false truth* dan *post truth*. Pembiaran atas situasi demikian membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kerentanan ini potensial terjadi pada generasi muda yang jumlahnya paling besar tetapi intensitas interaksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang paling minim. Hal ini sebagai akibat globalisasi dan digitalisasi tersebut sehingga generasi muda telah mengalami pergeseran nilai, norma, dan etika perilaku yang terdegradasi. Atas dasar tersebut, Tim PKM bermaksud memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar mengenai "Wawasan Kebangsaan Indonesia". PKM dilaksanakan di SMA Negeri 17 Jakarta berupa sosialisasi dan edukasi mengenai arti penting Pancasila terhadap permasalahan bangsa. Tujuan PKM ini untuk memberikan pemahaman dan pedoman kepada generasi muda agar tidak terpedaya dan mampu menempatkan diri ditengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan kekacauan. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia secara geopolitik memiliki tiga modal dasar dalam aspek geografis, demografis, dan historis sarat akan nilai dan makna untuk mencapai tujuan negara dan menghadapi tantangan zaman. Akan tetapi, kemajuan teknologi mendistorsi pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga menanamkan wawasan kebangsaan memerlukan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual dengan karakter generasi muda Indonesia. Melalui PKM ini, pelajar memperoleh pemahaman, gambaran, dan nilai-nilai kebangsaan yang perlu ditanamkan untuk menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Penguatan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memadupadankan pendekatan sosialisasi dan edukasi dengan aplikasi dalam aktivitas masyarakat.

**Kata kunci:** Globalisasi dan Digitalisasi, Pelajar, Wawasan Kebangsaan

## 1. PENDAHULUAN

Fase kehidupan manusia telah memasuki peradaban abad ke-21, di mana kelangsungan hidup masyarakat telah di intersepsi oleh berbagai kecanggihan dan kemudahan teknologi. Berbagai terobosan di bidang teknologi tersebut, berupa: (a) perpaduan teknologi menghadirkan sistem siber fisik (*cyber physical system*); (b) kehadiran super teknologi *robotic*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *internet of things* (IoT), hingga kendaraan dengan mekanisme otonomi penuh (*fully autonomous vehicle*); (c) kemudahan akses informasi dan komunikasi dengan berbagai bentuk dan model perangkat digital seperti *google*, *facebook*, *whatsapp*, dan sebagainya; dan (d) berbagai layanan yang terintegrasi secara daring (*online*) dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan seperti perdagangan, jasa pengiriman, perbankan, transportasi, politik, sosial, pendidikan, baik untuk keperluan bisnis, keluarga, hingga urusan pribadi (Savitri, 2020). Dengan kondisi tersebut pada nyatanya telah mendisrupsi secara radikal seluruh cara dan aktivitas hidup masyarakat secara individual maupun dalam hubungannya di lingkungan sosial.

Proses globalisasi dan digitalisasi pada saat yang bersamaan dalam seluruh aspek kehidupan tersebut dalam perkembangannya disebut sebagai “*internet interregnum*” yaitu fase peralihan (menuju penggunaan jaringan internet) yang diwarnai dengan kekacauan besar. Kondisi ini membawa kabar baik dan buruk secara bersamaan. Kabar baiknya masyarakat memiliki sarana baru untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih efektif, efisien, dan produktif serta menciptakan peluang-peluang baru. Kabar buruknya, kehadiran internet dengan segala layanan dan kemodernan perangkatnya menjadi sarana yang efektif untuk memicu kekacauan dan kerusakan antar dan lintas bangsa bahkan di semua aspek kehidupan (Sudiby, 2019). Dampak buruk tersebut yang telah dan sedang dirasakan dewasa ini, meliputi erosi budaya dan etika moral yang luar biasa, hingga praktik-praktik intoleran dan anarkisme (Sitabuana, 2022).

Kondisi yang demikian telah menandai suatu era baru, yang oleh Gunawan dan Ratmono (2021) dinamakan sebagai era *post truth*. Era *post truth* merupakan suatu masa di mana kebenaran direduksi berdasarkan pada preferensi pribadi dan perasaan individu, bukan pada fakta sebenarnya dan kepastian yang bersifat logis ilmiah. Lebih detail Ralph Keyes menjelaskan bahwa era *post truth* merupakan kaburnya batas antara kejujuran dan ketidakjujuran, kebohongan dan kebenaran, atau antara fakta dan fiksi, serta tidak hanya itu, termasuk pula pernyataan-pernyataan ambigu yang tidak sepenuhnya benar ataupun bohong. Dengan demikian dalam era *post truth* ini terdapat koeksistensi antara kebenaran dan kebohongan, serta antara kejujuran dan ketidakjujuran. Semuanya saling berkelindan dan menyulitkan orang untuk mengidentifikasi kebenaran. Kondisi yang berulang ini menyebabkan masyarakat potensial untuk tersesat dan terjebak dalam kebenaran semu (Gunawan dan Ratmono, 2021).

Dari kondisi potensi kekacauan yang begitu besar, salah satu korban yang paling potensial ialah generasi muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Hal ini sangat strategis di tengah ledakan bonus demografi di mana menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada tahun 2030 jumlah usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan berjumlah 297 juta jiwa (Fikrianto, 2022). Persoalan generasi muda Indonesia, dalam dekade terakhir telah menunjukkan terjadinya pemahaman atas nilai dan etika sosial, seperti membudayanya sikap ketidakjujuran, melemahnya rasa saling menghormati dan menghargai, sikap pragmatisme dan materialisme, hingga kerentanan untuk disusupi paham dan pemikiran yang intoleran dan radikal. Dalam survei yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace bersama International Forum NGO on Indonesia Development (INFID) pada periode Januari-Maret 2023 menunjukkan bahwa 83,3% pelajar di 5 (lima) kota di Indonesia berpendapat “Pancasila bukan ideologi yang bersifat permanen dan dapat diganti” (Setara Institute, 2023). Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hilangnya

interaksi sosial oleh interaksi digital, dan paparan budaya asing yang tidak sesuai (berbeda) dengan corak kebudayaan bangsa. Pada akhirnya, generasi muda kehilangan karakter dan jati diri keindonesiaan bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Menurut Malinowski, interaksi budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan etika dan karakter generasi muda bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan adanya penguatan terhadap wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara pandang dan kemampuan untuk memahami jati diri sebagai bangsa dalam bertindak laku di lingkungan internal maupun eksternal. Wawasan kebangsaan tersebut diwujudkan dengan mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosio budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan pemahaman wawasan kebangsaan tersebutlah suatu bangsa (termasuk warga negaranya) dapat menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan bangsa internasional. Dengan pemahaman akan wawasan kebangsaan, para generasi muda diharapkan dapat menginternalisasi dan menanamkan nilai penghargaan atas martabat manusia, tekad untuk hidup bersama dalam persatuan dan kesatuan, mencintai tanah air, menjunjung demokrasi dan kesetiakawanan sosial, serta mendorong terciptanya kohesi sosial (toleransi, gotong rotong, sopan santun, dan kepedulian sosial) diantara masyarakat (Siregar, 2022). Didasarkan pada dinamika, keprihatinan, dan tujuan tersebutlah, Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara memberikan edukasi dan advokasi penguatan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar. Para pelajar harus memahami arti penting Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan melalui penyuluhan mengenai “Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Sekolah: Tantangan dan Solusi”.

Adapun untuk tahapan pelaksanaan PKM terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan Awal, yaitu melakukan pengamatan perilaku pelajar (hal ini dilakukan dengan mencermati permasalahan pelajar, baik yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, media cetak, dan media elektronik). Setelah mencermati berbagai perkembangan masyarakat dan persoalan terkait pelajar, Tim PKM menemukan bahwa kenakalan remaja seperti perkelahian, tawuran, hingga semakin merosotnya etika dan sopan santun pelajar masih marak terjadi. Sementara itu, kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 semakin ditinggalkan dan diabaikan. Setelah mencermati kondisi tersebut, Tim PKM menentukan topik, tujuan, dan sasaran mitra PKM, pengurusan izin dan dokumen persyaratan untuk pelaksanaan PKM, serta koordinasi dengan pihak sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
2. Tahapan Prasurevei. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan aktivitas pelajar serta permasalahan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah. Tahapan ini dilakukan dengan berdiskusi bersama Kepala Sekolah dan Guru-Guru (sebagai pihak yang berinteraksi dan mengamati langsung perilaku pelajar dan perubahan yang mungkin terjadi seiring perkembangan waktu);
3. Tahapan Penyuluhan /Sosialisasi, yang dilakukan pada hari Kamis, 14 September 2023 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh ±100 siswa kelas XII (program IPS), didampingi oleh Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, dan guru-guru. Kegiatan penyuluhan diawali dengan penyampaian materi dengan tema “Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Sekolah: Tantangan dan Solusi” oleh Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana,

S.H., C.N., M.Hum., dengan menggunakan sarana *powerpoint* yang berlangsung  $\pm$  45 menit. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dari para pelajar untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ataupun pengalaman yang terkait dengan materi yang dipaparkan. Tujuannya untuk mengeksplorasi fenomena dan merangsang kemampuan para pelajar untuk berpendapat dan bersikap kritis atas permasalahan kebangsaan yang terjadi di Indonesia; dan

4. Tahapan Monitoring dan Evaluasi, dilakukan selama proses perencanaan hingga pasca sosialisasi untuk menjamin tercapainya semua tahapan dan waktu yang telah ditetapkan. Tahapan ini meliputi ketepatan waktu dan substansi, capaian kegiatan PKM, serta proses publikasi/diseminasi dan pelaporan hasil kegiatan PKM.

### Gambar 1

#### *Proses Pelaksanaan Kegiatan PKM*



*Sumber: Dixon Sanjaya, Tim PKM*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi awal yang disampaikan oleh Pemateri mengenai perkembangan fase kehidupan manusia, mulai dari era *Society 1.0* (masyarakat berburu/*hunting society*), era *Society 2.0* (masyarakat bercocok tanah/agraris dan munculnya peradaban manusia yang lebih kompleks), era *Society 3.0* (yang ditandai dengan masyarakat industri dan penemuan mesin uap sebagai awal proses industrialisasi, pada masa ini mulai muncul permasalahan-permasalahan sosial), era *Society 4.0* (era masyarakat informasi abad ke-20 di mana masyarakat terintegrasi secara digital dan terafiliasi dengan teknologi (industri) digital) dan era *Society 5.0* (ditandai dengan masyarakat *super smart* abad ke-21 yang menjadikan teknologi dan variasinya untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik dan proporsional (Suherman, dkk., 2020; Fukuyama, 2018).

### Gambar 2

#### *Penyampaian Materi "Wawasan Kebangsaan"*



*(Sumber: Dixon Sanjaya, Tim PKM)*

Dinamika dan perubahan global yang sangat cepat tersebut, khususnya dari era *Society 4.0* menuju *Society 5.0*, menyisakan berbagai persoalan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Kehidupan suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan dan dinamika global yang berupa informasi, inovasi, dan industri, melainkan beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai dan akar budaya yang mendasar dan bersifat fundamental. Kondisi ini menuntut Bangsa Indonesia untuk merefleksikan komitmen yang menjadi modal dasar dan utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen dasar tersebut, sejak era proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dicerminkan dalam nilai Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung 4 (empat) tanggung jawab nasional bagi berdirinya negara Indonesia merdeka, yaitu:

1. Melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan komitmen bernegara tersebut, maka potensi geopolitik nasional digali untuk menghadapi dinamika internasional, globalisasi, dan perkembangan digitalisasi yang bersifat *borderless* dan nirbangsa.

Menurut Sitabuana (2022), kondisi geopolitik nasional bangsa Indonesia memiliki 3 (tiga) modal dasar yang utama, yaitu:

1. Modal geografis, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara agraris, negara maritim, dan negara kepulauan dengan berbagai keunggulan, baik dalam konteks sumber daya alam, megabiodiversity, jalur strategis bagi pelayaran dan perdagangan dunia, wilayah yang terbuka bagi interaksi global;
2. Modal demografis, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar (diperkirakan pada tahun 2023 berjumlah 278.696.200), dan bonus demografi antara tahun 2010 - 2040 di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif, benar-benar bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara karena pada akhirnya manusia-lah yang harus mengerjakan semua kenyataan geografi yang dihadapi Indonesia; dan
3. Modal kesejarahan, bahwa sebagaimana pernyataan Ir. Soekarno mengenai “jas merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah)” memberikan pelajaran akan pentingnya rasa persaudaraan dan semangat kekeluargaan, keteladanan para pendiri bangsa, semangat persatuan dan kesatuan, prinsip gotong royong, dan kegigihan mencapai kemerdekaan.

Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi “*trademark*” ialah sebagai bangsa yang plural. Negara dengan kurang lebih 17.508 pulau (walaupun belum ada bukti ilmiah), 300 suku etnik bangsa, dan 1.340 suku bangsa, dan 700 bahasa daerah mampu direkatkan dengan berbagai modal dasar tersebut untuk hidup bersama dan menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi mereka berlandaskan ikatan kesatuan. Kondisi geopolitik dan wawasan kebangsaan Indonesia tersebut, terkandung ciri dan karakter keindonesiaan, yaitu: (a) bersifat integralistik; (b) antidiskriminasi atas dasar apapun; (c) Bhineka Tunggal Ika; (d) berwawasan Nusantara; dan (e) mengakar pada budaya lokal sebagai tumpuan yang melandasi aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Penerapan karakter kebangsaan tersebut memerlukan 2 (dua) aspek penting, yaitu:

1. Aspek moral berupa komitmen untuk bekerja sama melanjutkan eksistensi dan meningkatkan kualitas hidup bangsa serta tidak memberikan tempat kepada patriotisme yang licik dan oportunistis; dan
2. Aspek intelektual berupa pengetahuan yang memadai terhadap permasalahan, tantangan, dan potensi bangsa saat ini dan masa mendatang (Hanipah, dkk., 2022).

Dalam konteks terkini, eksistensi modal dasar tersebut cenderung terdistorsi dengan berbagai kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kemudahan dan kecanggihan serta konektivitas dengan sistem informasi dan kecerdasan buatan telah mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat atas kondisi keindonesiaan tersebut termasuk cara bersikap dan etika perilaku. Fenomena ini diakibatkan oleh kondisi yang dikenal dengan “VUCA” yaitu suatu istilah yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus tahun 1987 untuk menggambarkan situasi politik keamanan di era 1990-an. VUCA merupakan akronim dari *Volatility* (perkembangan dunia yang serba cepat, bergejolak, dan tidak stabil), *Uncertainty* (adanya ketidakpastian masa depan), *Complexity* (dunia modern semakin kompleks dengan masalah dan akibat yang berlapis, berkelindan, dan saling mempengaruhi), dan *Ambiguity* (lingkungan yang membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami) (Dwinda, 2021). Kriteria tersebut sangat sesuai menggambarkan perkembangan industri 4.0, yang dalam konteks Indonesia pada kondisi objektif terkini ditandai dengan infiltrasi intervensi ideologi selain Pancasila melalui media sosial, pudarnya keteladanan para pemangku kepentingan yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, persoalan radikalisme dan fundamentalisme, lemahnya penghargaan atas eksistensi manusia dan alam lingkungan, intoleransi, kekerasan, berita bohong, maupun ujaran kebencian.

Menurut Widisuseno dan Nurfatimah, sejak kemerdekaan, isu mengenai jati diri dan integritas nasional serta kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan di tengah era globalisasi dan liberalisasi disegala bidang yang potensial diintervensi ideologi nilai ideologi dan budaya sosial global yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, seperti pergeseran nilai moral, neoliberalisme, individualisme, dan materialisme yang mengancam integrasi bangsa (Siregar, 2022). Kondisi ini sangat rentan terjadi pada kelompok milenial hingga generasi Z yang cenderung individual dan mentalitas yang rapuh dan mudah berubah. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran karena jumlahnya yang sangat signifikan, maka tanpa upaya yang sistematis berkelanjutan akan menjadi bom waktu bagi keberlangsungan bangsa dan negara (Hasibuan, dkk., 2022).

### Gambar 3

*Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Para Pelajar*



(Sumber: Dixon Sanjaya, Tim PKM)

Setelah menyampaikan dan menjelaskan substansi wawasan kebangsaan, para pelajar diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang akan ditanggapi oleh narasumber. Karena kegiatan PKM dilakukan secara bersama-sama dengan tim PKM lainnya, maka setiap narasumber memperoleh 1 (satu) pertanyaan. Sehubungan dengan wawasan kebangsaan, pertanyaan dikemukakan oleh Kezia Jasmine dan Muhammad Zamin yang mempertanyakan fenomena perkawinan beda agama dan perkawinan LGBT jika dipandang dari perspektif wawasan kebangsaan. Terhadap pertanyaan tersebut, narasumber memberikan tanggapan bahwa dalam negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 memberikan kebebasan kepada warga negara untuk

melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, interaksi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak terlepas dari jaminan hak asasi manusia atas kebebasan individu (*individual privacy*). Hukum dan peraturan perundang-undangan memperkenankan perkawinan beda agama, tetapi sebaliknya perkawinan LGBT masih mengalami penentangan dan belum diperkenankan pelaksanaannya karena dinilai bertentangan dengan moralitas dalam ajaran agama dan nilai kebudayaan nasional. Hal ini memperoleh pembenaran berdasarkan Pasal 28J bahwa hak asasi manusia bukanlah bersifat universal mutlak melainkan dapat dibatasi dengan hak asasi manusia lainnya, dengan pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban. Inilah yang dalam diskusi wawasan kebangsaan khususnya terkait hak asasi manusia disebut dengan "*margin of appreciation*", yaitu suatu konsep hak asasi manusia yang ditujukan untuk menyeimbangkan penerapan universalitas HAM. Dalam hal itu, memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dengan kondisi domestik (kultural relativisme). Dasar tersebut menyebabkan pengaturan mengenai perkawinan beda agama dan perkawinan LGBT berbeda-beda di setiap negara, ada yang memperkenankan dan memfasilitas, tetapi ada juga yang menolak dan melarangnya.

Untuk dapat berperan dalam upaya mengatasi kritis multidimensional dengan segala deviasi dari kemajuan teknologi terhadap etika perilaku sosial tersebut, dapat dilakukan dengan skema *pentahelix*, yaitu dengan melibatkan 6 (enam) unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Di kalangan pelajar atau mahasiswa, upaya yang dapat dilakukan dari unsur-unsur tersebut, meliputi:

1. Membangun dan mengembangkan kebijakan tangkal wacana dan menumbuhkan budaya digital yang dilandasi pemahaman kondisi multikulturalisme dan kebhinekaan bangsa Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bermartabat;
2. Sinergitas semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, metode, langkah, maupun strategi yang tepat untuk memperkenalkan ideologi Pancasila, dan upaya aktualisasi yang lebih konkret dan relevan dengan kondisi terkini;
3. Membangun keteladanan yang mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dan karakteristik jiwa bangsa dalam keseharian;
4. Membangun dinamika lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang moderat, toleran, jujur, dan berbudi pekerti luhur;
5. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai katalisator bagi pengembangan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan budaya asli Nusantara; dan
6. Menjadikan pelajar sebagai agen atau *influencer* di media sosial yang menarasikan ideologi Pancasila dalam berbagai cara yang kreatif dan inovatif.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat membangun kembali karakter keindonesiaan dan menghadirkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas untuk menjawab tantangan perkembangan fase kehidupan manusia. Dari pelaksanaan kegiatan PKM ini dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan Indonesia memperoleh hasil awal, berupa: (a) Para pelajar dan pihak sekolah memperoleh pemahaman mengenai dinamika dan perkembangan sosial teknologi, Revolusi Industri 4.0, dan *Society 5.0* serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dalam dekade terakhir; (b) Para pelajar dan pihak sekolah kembali diingatkan akan peran dan fungsi Pancasila dan UUD 1945 beserta nilai-nilai yang dikandungnya sebagai pegangan, pedoman, dan orientasi perilaku dan sikap tindak dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi yang membahayakan kehidupan bangsa; dan (c) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, akseptabilitas, dan kredibilitas Pancasila sebagai ideologi

yang khas bagi bangsa Indonesia serta pilar penjaga kekokohan, persatuan, dan kesatuan sebagai bangsa dengan watak kebudayaan yang identik.

Meski demikian, upaya penguatan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar memiliki tantangan tersendiri seperti: (a) tidak seluruhnya pelajar memiliki ketertarikan terhadap persoalan wawasan kebangsaan; (b) penguatan wawasan kebangsaan di era modern memerlukan pendekatan waktu yang lebih panjang dan bertahap serta praktik yang lebih relevan dengan kondisi generasi muda Indonesia; dan (c) paradigma bahwa revitalisasi wawasan kebangsaan menjadi isu yang dianggap kurang penting (tidak populis) dalam pergaulan dan interaksi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan di SMA Negeri 17 Jakarta, dengan mengangkat tema “Penguatan Wawasan Kebangsaan Indonesia” diharapkan dapat menstimulasi dan mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya internalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai lokal (adat istiadat). Penguatan wawasan kebangsaan tersebut menjadi modal dasar yang akan memberikan pedoman, petunjuk, pegangan, dan pembentuk karakter generasi muda Indonesia agar tidak terpedaya dengan ideologi dan budaya asing, perkembangan teknologi, dan arus globalisasi dalam abad ke-21 yang potensial mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Meski demikian, upaya internalisasi wawasan kebangsaan memerlukan waktu untuk berproses dan metode pendekatan yang tepat, khususnya yang relevan dan mudah dipahami oleh pelajar sesuai dengan konteks zamannya.

Penanaman wawasan kebangsaan, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, sehingga sosialisasi serupa dan substansi yang lebih diperluas harus terus dilakukan oleh Tim PKM dan masyarakat luas sehingga internalisasi nilai kebangsaan terus terpelihara dalam diri para pelajar. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan perlu dilekatkan sebagai bagian dari program kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dan pendalaman substansi wawasan kebangsaan, metode untuk membumikan wawasan kebangsaan perlu dikombinasikan antara metode sosialisasi dan edukasi dengan praktik lapangan sehingga internalisasi nilai-nilai kebangsaan memiliki konteks riil di masyarakat dan dapat mengakar dalam aktivitas sehari-hari.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim PKM menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pimpinan dan pelajar SMA Negeri 17 Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah, dan terkhusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) yang terus mendorong tim PKM untuk secara berkala aktif melakukan pengabdian masyarakat dan membantu pendanaan dan diseminasi hasil pelaksanaan PKM.

#### REFERENSI

- Dwinda, A. (2021, April 23). “Mengenal VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity”. *Glints*. <https://employers.glints.com/id-id/blog/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity-ambiguity/>. Diakses pada 18 September 2023.
- Fikrianto, M. (2022, Agustus 22). “Pemuda Indonesia, Bonus Demografi, dan Peluang Masa Depan”. *Kompas*. <https://edukasi.kompas.com/read/2022/08/22/214437471/pemuda-indonesia-bonus-demografi-dan-peluang-masa-depan?page=all>. Diakses pada 18 September 2023.

- Fukuyama, M. (2018). “*Society 5.0: Aiming for New Human-Centered Society*”. *Japan Spotlight, Special Issue (2)*, 47-50.
- Gunawan, B. & Ratmono, B.M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hanipah, R. dkk. (2022). “Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan Abad 21”. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 678-683. <https://ummaspul.ejournal.id/maspuljr/article/view/3211>.
- Hasibuan, R.S. (2022). “Wawasan Kebangsaan untuk Kaum Milenial”. *Jurnal Pendidikan Tabusai*, 6(2), 10.823-10.828. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4149>.
- Pujianti, S. (2022, Oktober 19), “Pernikahan Berbasis Norma Agama dalam Perspektif HAM Internasional”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18624>. Diakses pada 20 September 2023.
- Savitri, A. (2020). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Genesis.
- Setara Institute. (2023, Mei 17). “Ringkasan Laporan Survei Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas”. <https://setara-institute.org/laporan-survei-toleransi-siswa-sekolah-menengah-atas-sma/>. Diakses pada 18 September 2023.
- Siregar, N. (2022). “Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi” [Versi Elektronik]. *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 255-266. <https://doi.org/10.56114/edu.v1i2.398>.
- Sitabuana, T.H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Sitabuana, T.H. (2022). “Meneguhkan Tekad dan Semangat Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Politik).” Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Hukum Universitas Tarumanagara, 2 Juli 2022, Jakarta.
- Sitabuana, T.H., Ruchimat, T., & Sanjaya, D. (2023). “Upaya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Media Sosial” [Versi Elektronik]. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 130-138. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24496>.
- Sudibyo, A. (2019). *Jagad Digital: Penguasaan dan Pembebasan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suherman. dkk. (2020). *Industry 4.0 vs Society 5.0*. Banyumas: Pena Persada.